

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

TESIS

Oleh:

ESI DESMIATI

06 206 061



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**

2008

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

Oleh ESI DESMIATI

(Di bawah bimbingan Dr. Nasri Bachtiar SE, MS dan Prof.Dr. Elfindri, SE, MA)

RINGKASAN

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut data BPS, jumlah rumahtangga miskin pada tahun 2005 mencapai 24,53 persen dari seluruh rumahtangga yang ada di Sumatera Barat.

Terjadinya kemiskinan diakibatkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti tingkat pendidikan yang rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan yang rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi. Terhadap kemiskinan di Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah persamaan Regresi Logistik dengan menggunakan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada tahun 2005 dengan sampel rumahtangga sebanyak 10.592 rumahtangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala rumahtangga yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) cenderung rumahtangganya miskin sebesar 2,275 kali di perkotaan dan sebesar 1,804 kali di daerah pedesaan dibanding kepala rumahtangga yang berpendidikan SLTA ke atas. Selanjutnya rumahtangga yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu cenderung rumahtangganya miskin sebesar 1,444 kali (pedesaan) dan sebesar 1,538 (perkotaan) dibanding kepala rumahtangga yang bekerja 35 jam ke atas perminggu. Selanjutnya, rumahtangga yang akses informasinya sulit cenderung miskin sebesar 5,702 kali (pedesaan) dan sebesar 4,267 kali (perkotaan) dibanding dengan rumahtangga yang tidak sulit akses informasinya. Sedangkan luas lahan (perkotaan dan pedesaan) dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap terbentuknya rumahtangga miskin, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif dan nilai $\text{Exp}(B)$ di bawah satu.

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kemiskinan di Indonesia baru mendapatkan perhatian luas sejak tahun 1993. perhatian semakin besar setelah pemerintah memperkenalkan program Inpres Desa Tertinggal pada tahun 1994. Walaupun demikian, analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai masalah ini masih terbatas jumlahnya. Baru setelah Indonesia dilanda badai krisis ekonomi maka analisis masalah kemiskinan mulai mendapatkan perhatian lebih luas, terutama karena urgensi untuk menganalisis dampak krisis terhadap tingkat kemiskinan dan berbagai prospek sosial ekonomi lainnya.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan persoalan yang bersifat multi dimensi, baik dimensi ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam perspektif ekonomi kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Ketidakmampuan tersebut diukur dengan tingkat pendapatan tertentu atau yang dikenal dengan garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan tingkat pendapatan ini kemudian lebih dikenal dengan kemiskinan secara absolut (Sumodiningrat; 1998: 26).

Lebih jauh Hagul (1986:5) menyatakan bahwa kemiskinan sesungguhnya merupakan rangkaian fenomena yang terkait satu sama lain. Orang miskin bukanlah kelompok yang terisolasi dan berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai

hubungan kerja yang cenderung bersifat eksploitatif. Selain itu, orang miskin umumnya tidak mempunyai harta dan mempunyai kualitas kehidupan sosial yang rendah serta tidak mempunyai pengaruh dan kekuasaan. Akibatnya, banyak orang miskin memiliki kemampuan yang lemah dalam berusaha serta tidak memiliki akses yang baik terhadap kehidupan ekonomi demi mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Setelah krisis ekonomi berjalan pada tahun keempat dimana berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan masih tetap menjadi masalah yang masih tetap memerlukan perhatian yang lebih besar lagi. Permasalahan kemiskinan yang masih terus berkembang salah satu adalah diakibatkan pendapatan masyarakat yang cenderung tidak meningkat bahkan ada sebagian dari masyarakat menerima pendapatan yang menurun. Sementara itu, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat selama masa krisis ekonomi cenderung terus mengalami peningkatan, sehingga garis kemiskinan juga terus bergerak semakin tinggi dan banyak masyarakat yang tidak dapat mengimbangi dengan pendapatan yang mereka peroleh.

Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi di Indonesia juga termasuk daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit. Menurut hasil pengumpulan data oleh BPS, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 1999-2005 cukup berfluktuasi. Pada awalnya jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 1999 terdapat sebanyak 566.133 orang, artinya terdapat penduduk sebanyak 566.133 orang yang tidak mampu melewati batas garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2003

jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat terjadi penurunan dan hanya tercatat sebanyak 501,1 ribu orang. Namun, pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 824,3 ribu orang.

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat Tahun 1999, 2003 dan 2005

No	Deskripsi	Sumatera Barat		
		1999	2003	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batas miskin (Rp/Kapita/bulan)	86.497	137.095	169.887
2	Banyaknya penduduk miskin (jiwa)	566,1	501,1	824,3
3	Persentase Rumah tangga miskin	12,03	11,24	24,53

Sumber : BPS Data dan Informasi Kemiskinan 1999, 2003 dan 2005

Demikian pula halnya dengan jumlah rumah tangga miskin, dimana pada tahun 2005 rumah tangga miskin di Sumatera Barat mencapai 24,53 persen dari seluruh rumah tangga yang ada di Sumatera Barat.

Terjadinya kemiskinan diakibatkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti masih banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikan rendah, etos kerja atau budaya kerja yang rendah, luas lahan produktif yang dimiliki sangat terbatas dan sulit untuk mengakses informasi. Akibat dari semua faktor di atas menggiring masyarakat pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya pendapatan dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan minimalnya produktivitas yang dihasilkan karena lahan yang mereka miliki terlalu sempit.

Variabel pendidikan dalam hal ini menjadi faktor yang diduga sebagai penyebab kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendidikan rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan wawasannya sehingga mereka mendapatkan kesulitan untuk mengembangkan kreativitas di berbagai bidang. Dengan rendahnya daya kreativitas masyarakat maka akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup.

Berdasarkan data BPS, dari seluruh rumahtangga miskin di Sumatera Barat tercatat sebanyak 77,29 persen kepala keluarganya berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) sedangkan kepala keluarga rumahtangga miskin yang berpendidikan SLTA ke atas hanya tercatat sebanyak 22,71 persen.

Demikian juga halnya dengan variabel budaya kerja yang diaplikasikan dengan rata-rata jam kerja. Bagi penduduk yang memiliki rata-rata jam kerja di bawah normal (37,5 jam per minggu) yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas berusaha akan berakibat pada rendahnya pendapatan mereka. Dengan jam kerja di bawah normal biasanya akan berakibat pada rendahnya produktivitas sehingga variabel budaya kerja ini menjadi salah satu penyebab yang dapat membentuk kemiskinan.

Sementara itu, di daerah pedesaan pada umumnya penduduk miskin bekerja pada sektor pertanian yang tidak didukung dengan modal yang memadai seperti hanya mengandalkan lahan pertanian yang sempit. Berdasarkan hasil survey BPS menyebutkan bahwa sekitar 74,23 persen dari seluruh penduduk miskin di Sumatera Barat hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 Ha,

sedangkan penduduk miskin yang memiliki luas lahan lebih dari 0,5 Ha hanya tercatat sebanyak 25,77 persen.

Akses informasi bagi sebagian daerah masih menghadapi kendala terutama di daerah pedesaan, dimana dengan lokasi daerah yang masih terisolasi mengakibatkan informasi yang masuk ke daerah tersebut menjadi cukup sulit. Akibatnya, masyarakat di sekitar daerah tersebut menjadi miskin dengan wawasan. Berdasarkan hasil survey BPS menyebutkan bahwa sekitar 74,99 persen dari seluruh penduduk miskin di Sumatera Barat menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi. Akibatnya wawasan yang mereka miliki menjadi sangat minim sehingga mereka mendapat kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Akses informasi dalam hal ini diartikan sebagai kemudahan penduduk dalam menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan berbagai kemajuan di segala bidang seperti ilmu pengetahuan, pengelolaan lahan, dan pengetahuan lainnya baik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.

1.2 Perumusan Masalah

Secara teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan terdiri atas penguasaan lahan, tingkat pendidikan, rendahnya jam kerja dan akses terhadap sumber informasi. Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Sejauhmanakah pengaruh tingkat pendidikan, jam kerja, luas penguasaan lahan, dan akses informasi secara parsial terhadap kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat ?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akhirnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendidikan kepala rumahtangga berpengaruh signifikan terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Artinya, sedikit banyaknya rumahtangga miskin di daerah pedesaan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan kepala rumahtangga itu sendiri.
2. Bentuk pengaruh antara budaya kerja yang dipresentasikan oleh jam kerja perminggu berpengaruh secara signifikan terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Artinya, semakin banyak jam kerja yang dilakukan oleh kepala rumahtangga maka akan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan rumahtangga guna memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga. Sehingga rumahtangga yang kam kerjanya di bawah normal cenderung akan menjadi miskin karena pendapatannya rendah.
3. Pengaruh antara luas lahan yang dikuasai rumahtangga terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat menghasilkan tidak berpengaruh terhadap rumahtangga miskin. Artinya, peluang rumahtangga yang memiliki luas lahan kurang dari 0,25 ha lebih rendah dibandingkan dengan rumahtangga yang memiliki luas lahan 0,25 ha ke atas. Kemiskinan yang terjadi di Sumatera Barat tidak semata-mata disebabkan karena sempitnya

lahan yang dikuasai oleh rumahtangga tetapi diindikasikan masih banyak lahan yang tidak produktif (lahan tidur) terutama di daerah pedesaan.

4. Variabel akses informasi secara signifikan berpengaruh terhadap rumahtangga miskin di Sumatera Barat. Maksudnya, sedikit banyaknya rumahtangga miskin di Sumatera Barat salah satunya diakibatkan oleh kurangnya akses informasi. Kemudahan akses informasi dengan adanya kemajuan teknologi masih belum dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat Sumatera Barat.

5.1 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas, akhirnya peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya turun tangan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masyarakat baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan informal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Cukup signifikannya lama jam kerja terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, untuk itu pemerintah perlu memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat terus meningkatkan tingkat produktivitas di seluruh sektor dengan bekerja lebih tekun.
3. Di daerah pedesaan luas lahan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan rumahtangga di Sumatera Barat. Untuk itu, perlu adanya upaya Pemerintah guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka penggunaan *lahan tidur* melalui bimbingan, pemberian bibit dan pupuk gratis atau bersubsidi dan penyuluhan yang terus menerus yang bertujuan guna peningkatan pendapatan rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellante dan Jakson (1990) *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- BPS, 1990. *Hasil Survey Biaya Hidup 1989 (SBH)*. Penerbit BPS Jakarta Indonesia
- _____, 1993. *Hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 1992)*. Penerbit BPS Jakarta
- _____, 1999. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, Penerbit BPS Jakarta Indonesia
- _____, 2003. *Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Tahun 2002)*. Penerbit BPS Jakarta
- Esmara Hendra, 1976. *Perkiraan Pembagian Pendapatan di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang
- _____, 1989. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Elfindri, 2001. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Universitas Andalas Padang.
- Gujarati, 1993. *Ekonomi Dasar*. Erlangga. Jakarta.
- Hassibuan, 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. PT. Pustaka Indonesia.
- _____, 1997. *Organisasi dan Motivasi*. PT. Pustaka Indonesia.
- Hasbullah, 2003. *Perekonomian Indonesia. Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Herman P Suryadi, 2002. "Roda berputar Dunia bergulir" Kognisi baru tentang timbul tenggelamnya Sosialisasi.
- Hidayat, 1978. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI)* Vol. XXVI, No.4 Desember.
- Jhon Kenneth Galbraith, 1978. *Almost Everyones Guide to Economic* (With Nicole Salinger).